

MODUL  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

# Bela Negara Kepemimpinan Pancasila

**PKA**

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
2021

**MODUL BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
2021**

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia**

**Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110**

**Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197**

**Fax. (62 21) 3800188**

## **BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA**

### **Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator**

#### **Tim Pengarah Substansi:**

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

#### **TIM PENULIS MODUL:**

1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd.,S.IP.,M.Si., M.H
2. Haryo B. Rahmadi, SE., M.Si (Han)
3. Gery Gugustomo, S.IP., M.Si (Han)
4. Fajri Hassan, S.E.Sy., M.Han

**REKA CETAK: .....**

**COVER: .....**

**Jakarta – LAN – 2021**

**ISBN: .....**

## KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Penyelenggaraan pelatihan menjadi bidang yang wajib mengikuti perkembangan teknologi. Orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran e-learning. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset dalam pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui e-learning menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran .....	4
D. Indikator Keberhasilan.....	4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	4
BAB II MATERI.....	6
A. Aktualisasi Cinta Tanah Air Melalui Perspektif Astagatra .....	6
1. Indikator keberhasilan .....	6
2. Pengertian Aktualisasi.....	6
3. Nilai Cinta Tanah Air .....	8
4. Perspektif Astagatra.....	10
5. Latihan .....	11
6. Rangkuman.....	12
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	12
B. Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Sistematika UUD NRI Tahun 1945.....	12
1. Indikator keberhasilan .....	12
2. Amanat Konstitusi .....	12
3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.....	14
4. Latihan .....	16
5. Rangkuman.....	16
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	17
C. Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN...	17
1. Indikator keberhasilan .....	17
2. Kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam Kepemimpinan. ....	17
3. Meyakini Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan .....	22
4. Latihan .....	23

5. Rangkuman.....	23
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	24
D. Kepentingan Sektoral, Kinerja Organisasi, Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme ASN.....	24
1. Indikator keberhasilan .....	24
2. Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi.....	24
3. Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara .....	25
4. Latihan .....	26
5. Rangkuman.....	27
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	28
E. <i>Metaplan</i> aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara.....	28
1. Indikator keberhasilan .....	28
2. Kondisi Ideal Ketahanan Nasional .....	28
4. Integritas dan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik .....	30
5. Latihan .....	31
6. Rangkuman.....	31
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	32
BAB III PENUTUP.....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Teori Maslow dengan Sila-Sila Pancasila .....	20
---	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dari suatu organisasi. Seiring perjalanan waktu, regenerasi pasti diperlukan agar suatu organisasi dapat terus eksis dan mengimbangi dinamika perubahan. Saat itulah personel yang datang belakangan akan menerima tongkat estafet pengelolaan organisasi dari mereka yang telah menjelang masa purna tugas.

Pada konteks ideal, segenap praktik dan keseharian organisasi menjadi sarana riil pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel organisasi. Namun demikian, banyak organisasi dengan sumber daya yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan. Lebih dari sekadar proses prosedural dan administratif dalam karier, pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktik dalam kesehariannya.

Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai-nilai ideal sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dapat mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Pada faktanya, beberapa tahun sebelum modul ini mulai disusun, istilah “bela negara” memang semakin meningkat popularitasnya. Peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada “bela negara” merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam memaknai praktik bela negara.

Selama ini banyak kalangan menganggap bahwa bela negara merupakan dominasi sektoral pertahanan keamanan semata. Sementara itu, perkembangan bentuk dan wujud ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara semakin bersifat lintas sektoral yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan pertahanan keamanan semata. Mulai dari manipulasi ajaran agama dan radikalisme yang menodai kehidupan demokrasi, liberalisasi ekonomi, ketergantungan terhadap teknologi, pelunturan esensi kebudayaan bangsa, hingga yang mendampak kesiapan pertahanan keamanan nasional.

Pelatihan kepemimpinan ASN dalam kaitannya dengan bela negara dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela

negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten ego sektoral agar dapat benar-benar menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral.

Pada praktiknya kelak, kesadaran akan pentingnya kerja sama sektoral akan memerlukan keterpaduan dan keselarasan yang utuh dengan segenap rakyat Indonesia sebagai faktor dominan yang utama dalam bela negara. Di sinilah makna sesungguhnya kepemimpinan yang perlu dibangun oleh ASN. Kepemimpinan adalah kesadaran utuh akan keberadaan pemimpin dan yang dipimpin. Sebagai abdi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, maka setiap jiwa dan pribadi ASN secara otomatis adalah *ex-officio* abdi bagi segenap jiwa dan pribadi rakyat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat bukanlah semata rakyat secara fisik yang berhak atas pelayanan publik dari negara. Kedaulatan rakyat juga merupakan manifestasi dari kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri yang dapat dilihat antara lain dari beragam kebijakan nasional yang mengatur jalannya negara dan kelembagaan negara. Oleh karena itu dalam tahapan pelatihan ini, kepemimpinan ASN akan difokuskan pada kinerja lembaga negara sebagai organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan.

Lebih dari sekadar kinerja pelayanan yang mudah dan memudahkan, kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara, dan dengan sendirinya merupakan wujud upaya bela negara. Kepemimpinan demikian tidak mungkin terbangun tanpa adanya cara pandang yang lahir dari rasa kebangsaan atau yang disebut sebagai wawasan kebangsaan.

Kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat, berbasis kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara sinambung akan memperkuat eksistensi negara dan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya secara material dan spiritual. Inilah sedikit dari ciri kepemimpinan Pancasila, yaitu kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, yang juga mewujudkan manusia Paripurna dengan segenap keutuhan potensinya.

Rangkaian harapan dan diskusi di atas tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat untuk diwujudkan. Karena tantangan yang kompleks inilah, pelatihan kepemimpinan administrator akan membekali ASN dengan beragam keahlian dan keterampilan seperti manajemen kinerja, pembangunan jaringan kerja, hingga manajemen risiko dan manajemen perubahan untuk mendukung inovasi sektor publik.

Secara spesifik, Modul Bela Negara Kepemimpinan Pancasila dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini meliputi materi sebagai berikut:

- Aktualisasi Cinta Tanah Air melalui perspektif Astagatra
- Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945
- Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN
- Kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi Bela Negara dalam profesionalisme ASN
- *Metaplan* aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara

Tanpa keahlian dan kapasitas yang memadai, terlebih lagi ketika kesinambungan kinerja organisasi dikesampingkan maka kepemimpinan akan menjadi media pencitraan organisasi dan pencapaian prestasi parsial yang kontraproduktif. Sebaliknya, segenap keahlian dan keterampilan tersebut diharapkan mencukupi bekal dan menjaga fokus ASN dalam upaya mewujudkan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud bela negara.

## **B. Deskripsi Singkat**

Mata pelatihan ini memfasilitasi Peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara.

### **C. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara.

### **D. Indikator Keberhasilan**

1. Peserta mampu mengaktualisasikan cinta tanah air melalui persepektif Astagatra;
2. Peserta mampu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI Tahun 1945;
3. Peserta mampu mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN;
4. Peserta mampu Menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme ASN;
5. Peserta mampu Mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara.

### **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Aktualisasi Cinta Tanah Air melalui perspektif Astagatra
  - a. Pengertian Aktualisasi
  - b. Perspektif Astagatra.
  - c. Nilai Cinta Tanah Air
2. Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945
  - a. Amanat Konstitusi.

- b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- 3. Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN.
  - a. Kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila.
  - b. Meyakini Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
- 4. Kepentingan Sektoral, Kinerja Organisasi, Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme ASN.
  - a. Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi
  - b. Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
- 5. *Metaplan* aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara
  - a. Kondisi Ideal Ketahanan Nasional.
  - b. Integritas dan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik

## **BAB II MATERI**

### **A. Aktualisasi Cinta Tanah Air Melalui Perspektif Astagatra**

#### 1. Indikator keberhasilan

Mengaktualisasikan cinta tanah air melalui analisis kolaboratif berbasis Astagatra untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer.

#### 2. Pengertian Aktualisasi

Dewasa ini banyak orang yang ingin mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai kegiatan dan kreativitas agar kehadirannya diakui. Aktualisasi yang mereka lakukan cenderung unik dan beragam antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga setiap orang memiliki identitas berdasarkan apa yang sudah mereka perbuat. Aktualisasi diri menjadi kebutuhan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang sudah disebutkan oleh Maslow (1970), pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang tertinggi dari lima kebutuhan dasar manusia (Adhani, 2013). Maslow (Arianto dalam Adhani, 2013) juga menyatakan bahwa aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Oleh karena aktualisasi merupakan pengembangan dari potensi yang unik, maka setiap orang yang perlu diberikan kebebasan dalam berkreasi.

Perfilyeva menyebutkan bahwa aktualisasi diri adalah proses implementasi seorang individu dari minat, kreativitas, keinginan untuk berkembang, kemampuan untuk bertanggung jawab dan kemandirian. Senada dengan yang disebutkan Pervilyeva, Robbins dan Coulter menyebutkan kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk mampu menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki (dalam Baidowi, 2017). Menurut Chaplin aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas sendiri (Pratika, 2014).

Dari berbagai pengertian yang disebutkan sebelumnya, maka aktualisasi dapat disimpulkan sebagai kebutuhan seseorang untuk mengimplementasikan minat, bakat, kreativitas, ataupun keinginannya dengan kecenderungan untuk meningkatkan bakat dan kemampuannya secara bertanggung jawab dan mandiri.

Maslow menyatakan aspek-aspek aktualisasi diri ada empat (Kurnia, 2015) yaitu:

- a. Penolakan terhadap penyeragaman, yang artinya setiap individu yang memiliki kreativitas akan melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan pada umumnya.
- b. Penerimaan diri. Setiap individu yang sudah terpenuhi kebutuhan aktualisasi nya cenderung dapat menerima dirinya sendiri apa adanya, orang lain, maupun lingkungannya.
- c. Minat sosial. Individu yang memiliki minat sosial tinggi mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi pada orang lain, penuh simpati dan berperikemanusiaan
- d. Kreativitas. Individu yang mampu mengaktualisasikan diri juga memiliki kesegaran apresiasi, kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang yang unik.

Aktualisasi akan selalu melekat dalam kehidupan setiap individu. Kebutuhan akan aktualisasi sebagai puncak dari kebutuhan manusia menjadi hal akan selalu muncul dalam berbagai lingkungan kehidupan dan memunculkan keunikan tersendiri dalam hal cara mengimplementasikannya.

Dalam kaitannya dengan individu yang ingin beraktualisasi dengan cara yang beda, Hersinta dan Soepomo (dalam Kurnia, 2015) menjelaskan bahwa dalam proses mewujudkan ide-ide yang kreatif dan tidak lazim, individu yang akan beraktualisasi diri itu mampu mewujudkan minat sosial yang tinggi. Ia mampu menerjemahkan ide-idenya dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh teman-temannya.

Tidak hanya dalam lingkungan sosial masyarakat. Dalam lingkungan kerja, kebutuhan akan aktualisasi juga diperlukan. Pegawai yang dapat mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan kerja dapat meningkatkan

prestasi kerja mereka. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhani (2013) di PT. Bank Tabungan Negara Tbk, cabang Syariah Surabaya yang menyatakan bahwa aktualisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Pegawai yang dapat mengaktualisasikan dirinya di tempat kerja akan bersikap dinamis, berpikir positif, memiliki kreativitas tinggi dan mau melakukan usaha ekstra sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan dalam dirinya (Adhani, 2013).

Dalam kaitannya dengan kepesertaan pelatihan, aktualisasi diri juga memiliki hubungan yang kuat dan positif atau berjalan searah dengan persepsi mengenai pelaksanaan pelatihan. Hal ini berarti apabila semakin tinggi aktualisasi diri peserta pelatihan, maka semakin tinggi pula persepsi mengenai pelaksanaan pelatihan yang diadakan (Pratika, 2014).

### 3. Nilai Cinta Tanah Air

Kamilin (dalam Ikhsan, 2017) menyebutkan dalam ilmu Psikologi perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu, kemudian di dalam diri seseorang tersebut akan tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi dan memeliharanya dari segala ancaman yang timbul. Cinta tanah air merupakan nilai pertama dari nilai-nilai bela negara. Tidak akan ada perjuangan untuk apa yang tidak dicintai. Dengan adanya rasa cinta dan memiliki, segala rintangan akan dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan (Ikhsan, 2017).

Senada dengan pengertian akan cinta tanah air di atas, dalam Modul Utama Pembinaan Bela Negara I: Konsepsi Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional, menyebutkan bahwa cinta tanah air merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (Wantannas, 2018).

Negara Indonesia adalah tempat kita dilahirkan. Dari sanalah bangsa Indonesia hidup dan darah dagingnya dibentuk dari hasil bumi pertiwi. Setiap jengkal wilayahnya adalah bentuk kedaulatan yang harus dilindungi. Maka dari itu rasa cinta tanah air harus terpatri kuat di sanubari setiap insan. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air tidak hanya cukup dengan jargon “saya cinta tanah air” saja, karena rasa cinta timbul dari dalam merupakan benda abstrak. Maka dari itu rasa cinta tanah air perlu didorong dengan berbagai implementasi. Dewan Ketahanan Nasional sendiri memiliki beberapa strategi untuk membangun rasa cinta tanah air (Wantannas, 2018), yaitu:

a. Mendorong Terbangunnya Daya Juang Bangsa

Stoltz P.G. (2003) mengatakan bahwa daya juang adalah sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur (Wantannas, 2018). Daya juang menjadi sikap bagi setiap individu untuk terus berjuang demi mencapai apa yang diinginkan. Tidak akan ada cita-cita yang tercapai tanpa perjuangan.

b. Mendorong Profesionalisme Bangsa

Berkaitan dengan isi dari Pasal 27 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 mengenai kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, maka sikap bela negara dapat diwujudkan dengan kesesuaian dengan profesinya masing-masing. Profesionalisme ini yang akan mendorong setiap warga negara untuk tetap produktif sehingga dari profesi tersebut akan menghasilkan nilai tambah yang akan mendorong kemajuan bangsa baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pendidikannya.

c. Mendorong Implementasi Nilai Cinta Tanah Air

Cinta tanah air merupakan rasa yang timbul dari dalam diri. Rasa cinta akan timbul jika yang mencintai tahu apa yang dicintainya. Maka dari itu setiap warga negara harus memahami bagaimana negara ini terbentuk dan bagaimana para pahlawan sebelumnya memperjuangkan dengan seluruh tumpah darah mereka memperjuangkan setiap jengkal wilayah negara ini. Nilai-nilai dasar negara dan segala yang membentuk negara ini perlu dipahami seutuhnya agar tidak timbul rasa cinta yang setengah hati.

Jika bukan karena atas dasar cinta tanah air, para Bapak Bangsa tidak akan pernah ada istilah kemerdekaan untuk negara Indonesia ini. Tidak lepas dari sejarah dalam awal pembentukan dasar negara melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Dari sanalah lahirnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai cita dan cinta luhur Bapak Pendiri Bangsa.

Pembentukan dasar negara dilakukan untuk mengisi kekosongan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila, secara keseluruhan, mencerminkan cita-cita emansipasi (lepas dari dunia lama) menuju kenyataan baru dimana “bangsa, tanah air, bahasa persatuan” menjadi pemersatu (Latif, 2018).

#### 4. Perspektif Astagatra

Di dalam Modul Utama Pembinaan Bela Negara 1: Konsepsi, Asta Gatra atau bisa disebut 8(delapan) gatra merupakan model perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya di atas bumi ini. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyimpulkan 8(delapan) aspek kehidupan nasional terdiri dari 3(tiga unsur) mengenai kehidupan ilmiah, yaitu kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan manusia, disebut juga dengan Tri Gatra. Interaksi ketiga aspek ilmiah tersebut melahirkan 5(lima) aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, disebut Panca Gatra.

Model tersebut juga dapat dipandang sebagai refleksi unsur-unsur yang dicintai dari Indonesia. Seseorang yang telah jatuh cinta, tentu tidak ingin apa yang dicintainya terganggu, apalagi sampai terancam musnah. Para pahlawan Indonesia sangat mencintai tanah dan air Indonesia, ketika kedua hal tersebut terancam direbut oleh penjajah melalui kekuatan militer, maka para pejuang Indonesia tidak ragu mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Begitu pula dengan warga yang telah berkembang dan mendapatkan banyak keuntungan ekonomi dari Indonesia, sudah sewajarnya dengan dasar kecintaannya terhadap ekonomi Indonesia, ia tidak akan mungkin membiarkan ekonomi

Indonesia terpuruk. Seorang yang cinta kepada olahraga Indonesia, tidak akan membiarkan olahraga Indonesia kehilangan bibit-bibit SDM unggul penerus prestasi olahraga Indonesia. Rasa cinta tanah air merupakan modal dasar utama kekuatan bangsa untuk menghadapi bentuk-bentuk baru AGHT.

Mengaktualisasikan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, tiap warga harus mengenal Indonesia seutuhnya mengenai arti dan makna identitas serta keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Mulai dari identitas negara kepulauan, kemajemukan bangsanya, dalam ikatan nilai-nilai dan makna lambang-lambang negara seperti Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, serta Lagu Indonesia Raya merupakan nilai-nilai-nilai cinta tanah air yang harus dimiliki setiap warga negara.

Kecintaan secara menyeluruh akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang tulus dan ikhlas untuk selalu siap menghadapi segala kondisi yang mengancam kesatuan, persatuan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

## 5. Latihan

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang aktualisasi Cinta Tanah Air, saudara diminta melakukan:

- a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Aktualisasi Cinta Tanah Air
- b. *Desk research* latar belakang informasi.
- c. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
- d. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan astagatra.
- e. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok.

Analisis dilakukan melalui diskusi pasangan (*Think, Pair, Share*) atau kelompok kecil (*Buzz-Group Discussion*). Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan (*Cross-referencing*) dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu diuraikan mengenai aktualisasi Cinta Tanah Air.

6. Rangkuman
  - a. Aspek kehidupan nasional terdiri dari 3 (tiga) mengenai kehidupan ilmiah, yaitu kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan manusia, disebut juga dengan tri gatra. Interaksi ketiga aspek ilmiah tersebut melahirkan 5 (lima) aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, disebut panca gatra. Kedelapannya disebut dengan asta gatra.
  - b. Mengaktualisasikan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, tiap warga harus mengenal Indonesia seutuhnya mengenai arti dan makna identitas serta keberadaan bangsa dan negara Indonesia.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melihat video yang disajikan fasilitator dan berdiskusi mengenai cinta tanah air? Jika sudah maka diharapkan pemahaman saudara mengenai materi pertama ini semakin dalam. Jika belum, saudara diharapkan dapat mendiskusikan makna dibalik film pertama pada materi pertama ini.

**B. Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Sistemika UUD NRI Tahun 1945**

1. Indikator keberhasilan

Mengaktualisasikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistemika UUD NRI tahun 1945 melalui analisis kolaboratif dalam isu kontemporer.

2. Amanat Konstitusi.

Tujuan negara, sebagaimana tertulis dalam amanat konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai perbandingan, negara Amerika memiliki suatu konsep strategis yang disebut dengan DIME yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an. DIME sebagai representasi kekuatan nasionalnya merupakan singkatan dari *Diplomacy* (diplomasi), *Informational* (informasional), *Military* (militer), dan *Economy* (ekonomi). Keempat elemen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (Rahmadi H. B., 2016).

Katakan saja mengurangi diplomasi akan berdampak pada pelemahan posisi negara di mata internasional. Informasional merupakan gambaran untuk kemudahan dalam mengakses informasi yang akan berdampak pada kecerdasan. Militer menjaga keamanan dalam kegiatan berbisnis dan ekonomi memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas sumber dayanya. Setiap elemen tersebut memiliki pengaruh yang sangat simultan terhadap unsur lainnya.

Jauh melampaui Amerika Serikat, Indonesia sudah menerapkan keempat elemen kekuatan tersebut dalam Tujuan Negara. Perlindungan untuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (militer), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan/ informasi), memajukan kesejahteraan umum (ekonomi), dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia (diplomasi) menjadi konsep yang sama seperti dalam DIME yang AS cetuskan sejak tahun 1960-an, namun para pendiri bangsa kita sudah menyadarinya lebih lama dan menuangkannya dalam konstitusi negara, Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Di era globalisasi yang semakin tak terbatas dalam akses informasi dan persaingan di berbagai bidang dan tataran semakin meningkat. Di sinilah relevansi tujuan negara yang diterapkan dalam nilai-nilai Bela Negara menjiwai semangat perjuangan para pahlawan dan kita patut berterima kasih dan bersyukur karena perjuangan dan pengorbanan merekalah kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini.

Banyak hal yang memprihatinkan ketika banyak dari kita justru menjadikan dunia Barat sebagai *role model* dan lupa bahwa sebenarnya kita memiliki khazanah kearifan lokal yang begitu luas dan dalam warisan para pejuang. Entah apakah karena menganggap dunia Barat lebih menyalurkan atau karena warisan tersebut semakin dalam terkubur.

### 3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki dua arti yaitu pertama, nilai kesadaran berbangsa merupakan nilai untuk selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing dan kedua, nilai kesadaran bernegara merupakan nilai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Wantannas, 2018).

Berbicara mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara berarti membicarakan kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala keanekaragamannya, terutama dalam hal sosial dan budayanya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan agama. Jika keberagaman tersebut tidak dikelola, maka dapat menjadi ancaman yang mengarah kepada pemecah belahan bangsa, seperti isu suku, ras, dan agama (SARA).

Oleh karena Indonesia yang memiliki kekayaan dalam hal sosial dan budayanya, maka kesemuanya disatukan dalam satu ideologi pemersatu bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang di dalamnya memuat beberapa fungsi penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui sila ketiga, persatuan Indonesia (Hanafi, 2018).

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan (Eddy, 2018). Dari sejarah perumusan Pancasila kita mengetahui bahwa para perumus ideologi bangsa dan negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari latar pendidikan pekerjaan, maupun pemikiran, namun memiliki satu tujuan, yaitu persatuan Indonesia. Hariyono (dalam Asmaroini, 2017) mengatakan bahwa kepentingan bangsa dan Negara selalu menempati posisi yang dominan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.

Lambang Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara digambarkan dengan burung Garuda yang mencengkeram pita dengan tulisan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Semboyan tersebutlah yang

mempersatukan keberagaman suku dan bangsa. Semboyan tersebut menjadi simbol kesadaran bahwa dalam keberagaman, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terus berjalan beriringan. Dari semboyan tersebut diharapkan bangsa kita terus bergotong royong, berjuang bersama dalam mewujudkan visi negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam keberagaman, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kebersamaan dan bersatu padu tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, budaya dan lain-lain menjadi modal utama untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah berkorban untuk kemerdekaan anak cucu mereka, sebagaimana dengan semboyan yang tertulis dalam cengkaman kaki burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika”; walaupun kita berbeda tetapi tetap bersatu, dengan begitu kita dapat membangun keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ruslan, 2013).

Oleh karena kesadaran berbangsa dan negara perlu ditumbuhkan demi mencapai cita-cita negara, paling tidak ada tiga Strategi yang dicetuskan oleh Dewan Ketahanan Nasional untuk menumbuhkan nilai Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (Wantannas, 2018), yaitu:

a. Pendekatan Kesadaran Warga Negara

Strategi membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Artinya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui pendidikan secara formal, informal, ataupun nonformal, yang dimana pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

b. Sasaran Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Nilai-nilai kesadaran berbangsa harus tertanam dalam pikiran setiap warga negara. Oleh karena itu nilai sasaran menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat tertuju kepada lingkungan pendidikan (formal, informal, nonformal, siswa, mahasiswa, dan sebagainya), lingkungan Pemerintahan

(kementerian atau lembaga), instansi swasta, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya.

c. Teknik Pembelajaran Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Model pembelajaran yang digunakan dalam menanamkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara adalah dengan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/ CTL*). Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata, sehingga materi yang diajarkan selalu relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Latihan

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945, saudara diminta melakukan:

- a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945
- b. *Desk research* latar belakang informasi.
- c. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
- d. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan astagatra.
- e. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok.

Analisis dilakukan melalui diskusi pasangan (*Think, Pair, Share*) atau kelompok kecil (*Buzz-Group Discussion*). Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan (*Cross-referencing*) dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu diuraikan mengenai aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945.

5. Rangkuman

- a. Tujuan negara, sebagaimana tertulis dalam amanat konstitusi Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2)

Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

- b. Negara Amerika memiliki suatu konsep strategis yang disebut dengan DIME yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an. DIME sebagai representasi kekuatan nasionalnya merupakan singkatan dari *Diplomacy* (diplomasi), *Informational* (informasional), *Military* (militer), dan *Economy* (ekonomi). Keempat elemen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jauh melampaui Amerika Serikat, Indonesia sudah menerapkan keempat elemen kekuatan tersebut dalam Tujuan Negara.

#### 6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melihat video yang disajikan fasilitator dan berdiskusi mengenai Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945? Jika sudah maka diharapkan pemahaman saudara mengenai materi pertama ini semakin dalam. Jika belum, saudara diharapkan dapat mendiskusikan makna dibalik film pertama pada materi pertama ini.

### C. Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN

#### 1. Indikator keberhasilan

Mengaktualisasikan Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila dalam konteks ASN melalui analisis kolaboratif berbasis sila-sila Pancasila untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer.

#### 2. Kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam Kepemimpinan.

Kata pemimpin sering kita dengar, namun apakah kita benar-benar memahami apa itu arti "Pemimpin". Sebelum kita memahami apa itu Pemimpin, kita harus mengetahui dulu apa syarat untuk menjadi pemimpin.

Jika pemimpin harus bersikap tegas, kita sering melihat fenomena di mana dalam ruang kelas terkadang yang paling mudah ditunjuk untuk

menjadi ketua kelas adalah mereka yang kurang tegas, karena dapat diperintah dengan sesuka hati. Jika pemimpin harus independen, nyatanya kita sering menemui orang yang sangat independen terkadang dengan sesuka hati memerintah seseorang. Jika pemimpin harus bisa mendengarkan omongannya, maka tidak ada harapan bagi tunawicara untuk menjadi seorang pemimpin.

Oleh karena banyak kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka hal yang paling sederhana dan sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin adalah ada yang “dipimpin”. Seorang Pemimpin setidaknya memiliki 1(satu pengikut), Tidak ada seorang pemimpin disebut pemimpin jika tidak ada subjek yang dipimpin (Kellerman, 2007).

Seorang pemimpin yang baik harus paham kebutuhan pengikutnya, mulai dari makanan dan minuman, bernapas, berpakaian, bekerja, ilmu, teman, pernikahan, pengakuan, dan sebagainya. Akan tetapi, agar pembahasan mengenai apa yang dibutuhkan orang lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka kita dapat merujuk ke teori Maslow yang banyak dipakai sebagai referensi untuk membicarakan kebutuhan dan motivasi manusia.

Teori Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia kedalam lima hierarki yang mana pemenuhan-nya bersifat berjenjang dalam artian ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi maka ia akan naik ke kebutuhan selanjutnya hingga mencapai kebutuhan pada tingkat tertinggi (Sari & Dwiarti, 2018). Kebutuhan manusia menurut Maslow tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bentuk piramida, yang dimana kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis atau fisik, lalu di atasnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri (Maslow A. , 1943).

Jika dikonversikan teori Maslow tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, maka kebutuhan fisiologis sama dengan kebutuhan akan makan nasi (sebagai makanan pokok orang Indonesia secara umum). Kebutuhan akan rasa aman sama dengan memiliki mobil sendiri saat bepergian. Kebutuhan akan rasa kasih sayang sama dengan kebutuhan akan hadirnya teman, katakanlah teman kuliah yang sampai saat ini masih

sering menemani kita bercengkerama atau teman kerja. Kebutuhan akan penghargaan sama dengan persaingan dalam bekerja antar pekerja atau karyawan, dari memenangkan persaingan ini seseorang bisa mendapatkan penghargaan. Kebutuhan puncak tertinggi adalah aktualisasi diri yang sama dengan pengakuan yang tercermin dari kepakaran atau keahlian seseorang.

Jika merujuk kepada keinginan manusia yang tanpa batas, lima kebutuhan dasar tadi dapat terus meningkat. Maka dari itu kebutuhan manusia tersebut akan berkembang seperti berikut:

Makan nasi bertambah menjadi makan spaghetti. Aman berkendara meningkat jadi rasa aman memiliki rumah dan satpam. Kasih sayang teman meningkat menjadi berkenalan dengan pejabat. Persaingan antar karyawan meningkat menjadi persaingan antar direksi. Pengakuan kepakaran meningkat menjadi pengakuan tingkat nasional.

Setelah semua kebutuhan tersebut terpenuhi, kebutuhan dasarnya akan meningkat kembali. Makan spaghetti meningkat menjadi makan daging *steak*. Kepemilikan rumah meningkat menjadi memiliki villa di puncak. Pertemanan dengan pejabat meningkat jadi kenal dekat dengan presiden. Persaingan antar direksi meningkat menjadi persaingan antar pimpinan DPR. Pengakuan kepakaran tingkat nasional meningkat menjadi kepakaran tingkat internasional.

Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, kebutuhan dasar lainnya akan bertambah lagi. Makan daging *steak* berkembang menjadi makan Kaviar (telur ikan yang dinobatkan sebagai makanan termahal di dunia). Punya villa berkembang menjadi memiliki pulau pribadi. Pertemanan dengan presiden meningkat menjadi pertemanan dengan Sekjen PBB (persatuan Bangsa-bangsa). Persaingan antar pimpinan DPR meningkat menjadi persaingan antar kepala negara. Pengakuan secara internasional meningkat menjadi Ketua Juri Nobel Internasional.

Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi keinginan lainnya. Memakan Kaviar meningkat menjadi kepemilikan pabrik Kaviar. Kepemilikan pulau pribadi meningkat menjadi keinginan membangun negara sendiri. Pertemanan meningkat menjadi bersahabat dengan Luke Skywalker (dalam serial *Star Wars*). Persaingan

antar kepala negara meningkat menjadi persaingan antar pimpinan planet. Pengakuan sebagai Ketua Juri Nobel meningkat menjadi Ketua Pemilihan *Miss Galaxy*.

Begitulah kebutuhan manusia yang akan selalu meningkat dari yang paling dasar hingga yang tidak terpikirkan melawan batas nalar manusia. Hasrat keinginan manusia, mereka biasanya lebih cenderung pada tujuan dari pada sebuah bagian ujung dari kebutuhan diri manusia (Maslow A. , 1954). Jika kebutuhan dasar yang berkembang menjadi siklus keinginan ini dibiarkan terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi saling menjatuhkan dan saling menghancurkan demi memenuhi nafsu semata.

Cara pemenuhan kebutuhan tersebut akan berbeda jika analogi pencapaiannya dimodifikasi. Kebutuhan makan dicari bersama, lalu rasa aman diwujudkan dengan saling melindungi, persaingan dan pertemanan dilakukan secara seimbang, tidak ada rasa mendendam, terakhir rasa saling menghargai diwujudkan dengan mengakui eksistensi setiap orang secara manusiawi dan beradab. Dengan meningkatkan rasa persatuan dan tenggang rasa antar sesama hidup akan terasa tenteram, *gemah ripah loh jinawi*.

Apakah cukup pengakuan antar sesama manusia? Ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual. Dalam keadaan se-genting apapun mereka akan tetap ingat pada Tuhannya, walaupun penuh berlumur dosa dan sering mengabaikan perintah-Nya. Pengakuan terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akan selalu ada. Kehadiran Tuhan dalam setiap jiwa insan akan selalu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hati yang sifatnya spiritual. Petunjuk dari Tuhan ini yang akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar agar tidak selalu mengikuti hawa nafsunya.

Ternyata semua unsur kebutuhan manusia itu terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Teori Maslow	Bentuknya	Nilai-nilai Pancasila
-	-	Pengakuan terhadap Tuhan YME untuk

		meraih Ridho-Nya (Sila ke-1)
Aktualisasi diri	Pengakuan semua orang	Pengakuan yang dilakukan secara manusiawi dan beradab (Sila ke-2)
Penghargaan	Persaingan dan pertemanan yang dilakukan dengan seimbang	Kekompakan dalam persaingan dan pertemanan yang mencerminkan persatuan Indonesia (Sila ke-3)
Kasih sayang		
Rasa aman	Saling melindungi	Pemimpin yang selalu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya (Sila ke-4)
Kebutuhan fisiologis	Mencari makan bersama-sama	Kesejahteraan sosial bagi sesama, selalu disimbolkan dengan padi dan kapas/pangan dan sandang (Sila ke-5)

**Tabel 1. Perbandingan Teori Maslow dengan Sila-Sila Pancasila**

Sumber: Haryo B. Rahmadi (2019). The Millennial Approach to Balance Individual, Organizational, & National Interests in the Globalizing World. Bahan Tayang dalam acara Mini Human Capital Summit Kementerian Keuangan RI, 5 Juli 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam Teori Maslow hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi manusianya, akan tetapi juga kebutuhan spiritualitas-nya. Maka Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melampaui hingga kepada kebutuhan batiniah. Hal ini senada yang dikatakan oleh Presiden ke satu Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengenai Pembebasan Irian Barat, dalam sambutan nya di Sidang Pengurus Pusat Front Nasional tahun 1963, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan jutaan Insan *Al-Kamil*<sup>1</sup>, membangun manusia seutuhnya dan berbahagia di kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (KCPI, 2019).

Maka dari itu pemahaman Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan

<sup>1</sup> Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam tulisannya yang berjudul "Apa itu Insan Kamil?" menyebutkan bahwa Insan Kamil atau manusia paripurna, dipahami kalangan sufi sebagai lokus penampakan diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/tasawuf/12/03/18/m139ju-apa-itu-insan-kamil-1> pada 20 November 2019

kebutuhan manusia yang paripurna yang tidak hanya berkebutuhan antara kepentingan ego dan material semata (Rahmadi H. B., 2019)

### 3. Meyakini Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Selain mewujudkan jutaan insan Al-Kamil yang disampaikan Ir. Soekarno, TAP MPR Nomor IV tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara juga menjelaskan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pada masa kini, pembangunan nasional, oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP), dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil-makmur. Melalui pemahaman lintas zaman tersebut, lokus dari pembangunan nasional tetaplah manusia Indonesia

BPIP telah menginventarisasi masyarakat adil dan makmur yang harus dipenuhi berdasarkan Pancasila, antara lain (Samekto, 2019):

- 1) Sandang-pangan terjamin, perumahan yang layak bagi warga negara;
- 2) Kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia terjamin;
- 3) Adanya jaminan hari tua setiap warganegara Indonesia;
- 4) Jaminan setiap warganegara Indonesia dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan kerohanian nya;
- 5) Terbuka kesempatan luas bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia.

Unsur-unsur di atas merupakan gambaran mengenai kondisi yang diinginkan mengenai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan unsur-unsur kebutuhan jasmani saja, namun juga unsur kebutuhan rohani, dan Pancasila menjadi dasar untuk pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya.

Peran pelayanan publik ASN berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia, mengelola dan mengawal proses perubahan dalam membawa perubahan dari kondisi manusia Indonesia saat ini,

menuju kondisi manusia Indonesia yang diinginkan. Kepemimpinan ASN begitu penting dalam mewujudkan jutaan manusia paripurna, yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan mengenai kepemimpinan ASN dalam membawa perubahan akan dijelaskan lebih lanjut pada agenda modul berikutnya.

#### 4. Latihan

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN, saudara diminta melakukan:

- a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila
- b. *Desk research* latar belakang informasi.
- c. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
- d. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan sila-sila Pancasila.
- e. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok

Analisis dilakukan melalui diskusi pasangan (*Think, Pair, Share*) atau kelompok kecil (*Buzz-Group Discussion*). Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan (*Cross-referencing*) dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu diuraikan mengenai aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN.

#### 5. Rangkuman

- a. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki subjek yang dipimpin dan yang dipimpin adalah manusia.
- b. Seorang pemimpin yang baik harus paham akan kebutuhan orang yang dipimpinnya.
- c. Teori Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia kedalam lima hierarki yang mana pemenuhan-nya bersifat berjenjang dalam artian ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi maka ia akan naik ke

kebutuhan selanjutnya hingga mencapai kebutuhan pada tingkat tertinggi.

- d. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna yang tidak hanya berkuat antara kepentingan ego dan material semata.

#### 6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melihat video yang disajikan fasilitator dan berdiskusi mengenai Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN? Jika sudah maka diharapkan pemahaman saudara mengenai materi pertama ini semakin dalam. Jika belum, saudara diharapkan dapat mendiskusikan makna dibalik film pertama pada materi pertama ini.

### **D. Kepentingan Sektoral, Kinerja Organisasi, Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme ASN**

#### 1. Indikator keberhasilan

Menginternalisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konflik kepentingan sektoral sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN.

#### 2. Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi

Sentimen dan kepentingan sektoral sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi. Hal tersebut menjadi pernyataan dalam Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2010. Hal tersebut berdasarkan pemetaan dan analisis kebijakan sektoral, di mana terdapat kurang lebih 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, 29 diantaranya bidang urusan tersebut mengalami tumpang tindih atau terdapat potensi masalah.

2(dua) tahun berselang sejak Kajian oleh Bappenas tersebut, sebuah organisasi asing, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) membuat kajian mengenai Reformasi Regulasi di Indonesia (2012). Terdapat beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi, sehingga tercipta ketidakpastian peraturan. Akibat dari situasi ini, K/L sektoral tampak lebih berkuasa atas kebijakan-kebijakan sektor mereka dan kepentingan sektoral memiliki kecenderungan politik yang besar.

10 tahun berselang, masalah tumpang tindih regulasi masih terjadi, sehingga masih tergambar bahwa sentimen dan kepentingan sektoral masih menjadi penghambat koordinasi dalam organisasi. Salah satu contohnya mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dimana tanah yang dimiliki MHA seringkali terlibat sengketa dengan pihak yang ingin memanfaatkannya (Sukirno, 2010). Pengaturan mengenai MHA melalui banyak perundang-undangan, Sulaiman (2019) mengatakan secara umum ada 5(lima) kategori, yaitu UU tentang Sumber Daya Alam, UU tentang Sektoral, UU tentang Pemda, UU tentang otonomi khusus dan istimewa, dan UU tentang MHA. Menurut Sulaiman (2019), seharusnya ketika dihadapkan pada kepentingan MHA, maka posisi UU MHA lebih dominan. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, justru posisi UU Sektoral dan UU SDA sangat menentukan keberadaan MHA secara operasional. Pengaturan MHA mengalami kendala dengan pemahaman MHA yang berbeda-beda, pengaturan MHA juga tergantung pada dimensi lain, yaitu hukum, sosial, politik, budaya, agama, dan ekonomi. Tentunya hal tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor, bersinergi untuk mewujudkan kepentingan publik.

### 3. Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam konstitusi diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan

mampu menjalankan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

UU Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Profesor Cecep Darmawan (2015) mengatakan salah satu bentuk aktualisasi bela negara yang dapat menjadi contoh adalah tugas evakuasi korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas). Pelaksanaan misi evakuasi yang dilakukan Basarnas bermakna penting dan fenomenal bagi kehidupan berbangsa dan eksistensi persatuan serta kesatuan NKRI. Penunaian tugas Basarnas dilakukan demi membela kepentingan publik, ditempatkan sebagai kepentingan yang lebih prioritas daripada kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

Di dalam Modul Utama Pembinaan Bela Negara 2: Implementasi, dijelaskan bahwa dalam Instruksi Presiden No 7 tahun 2018 terdapat berbagai program aplikatif untuk menerjemahkan Aksi Nasional Bela Negara. Jika diperhatikan, program-program aplikatif tersebut sebenarnya sudah terdapat di RKA-K/L masing-masing dengan nomenklatur yang mungkin berbeda, namun memiliki esensi yang sama. Sehingga perlu ditekankan bahwa segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan Pemerintah Daerah merupakan perwujudan bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal itu juga berarti segenap ASN di dalam K/L dan Pemerintahan Daerah yang menjalankan kebijakan tersebut juga merupakan perwujudan bela negara. Dengan demikian, K/L dan Pemda dengan segenap ASN-nya hanya perlu meningkatkan sinergi lintas sektoral serta melakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya duplikasi konten/program (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018b).

#### 4. Latihan

Untuk lebuah menginternalisasikan tentang aktualisasi Bela Negara dalam profesionalisme ASN dalam konteks kepentingan sektoral dan

kinerja organisasi, saudara diminta melakukan simulasi atau permainan dengan metode kartu edukasi. Permainan ini masih menjadi media yang menghibur, sehingga populer digunakan sebagai sarana edukasi yang bersifat sosial. Nilai edukasi disampaikan melalui konten yang terdapat dalam kartu, namun tidak menghilangkan unsur menyenangkan karena didukung tata cara bermain yang sedemikian rupa.

Edukasi melalui permainan kartu telah diteliti secara akademisi, antara lain yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Pertahanan, Idham Wahyudi (2016), yang menghasilkan prototipe permainan kartu untuk pembelajaran dan simulasi pola peperangan ekonomi di Indonesia, bernama *DATASAWALA*. Permainan kartu juga dikembangkan lebih lanjut oleh Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda Angkatan XVIII TA. 2018 Pusdiklat Manajemen Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (2018), yang menghasilkan *HANACARAKA*, sebuah permainan kartu untuk edukasi dan simulasi peperangan pembentukan opini publik.

Jenis permainan kartu lain yang dapat digunakan adalah *The Coaching Game*, dikembangkan oleh *Point of You* (2019). Permainan ini menggunakan kartu asosiatif berisi gambar/foto dengan sebuah topik, disertai dengan buku yang merangsang pikiran. Dapat dimainkan secara individual, satu lawan satu, serta dapat juga dimainkan bersama kelompok kecil/besar. *The Coaching Game* menawarkan permainan yang dapat memberikan peserta kebebasan pola pikir dari yang selama ini ditetapkan, melihat sebuah topik dari berbagai titik pandang, sehingga terbuka kemungkinan baru bagi individu untuk berkembang.

## 5. Rangkuman

- a. Sentimen dan kepentingan sektoral sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi.
- b. Sejatinya kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat. Sehingga perlu ditekankan bahwa segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan Pemerintah Daerah merupakan perwujudan bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- c. Masalah tumpang tindih regulasi masih terjadi, sehingga masih tergambar bahwa sentimen dan kepentingan sektoral masih menjadi penghambat koordinasi dalam organisasi.

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan permainan kartu edukasi? Jika sudah maka diharapkan pemahaman saudara mengenai Kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi Bela Negara dalam profesionalisme ASN semakin dalam. Jika belum, saudara diharapkan dapat mendiskusikan makna dibalik film pertama pada materi pertama ini.

**E. *Metaplan* aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara**

1. Indikator keberhasilan

Menerapkan kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara dan konsepsi kebangsaan untuk menganalisis dan mengembangkan aksi perubahan untuk mendukung kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kemampuan awal bela negara.

2. Kondisi Ideal Ketahanan Nasional

Asta Gatra dalam Wawasan Nusantara terdiri dari Tri Gatra yang cenderung bersifat statis dan Panca Gatra yang sifatnya dinamis. Terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya, sehingga didapati kondisi ideal Ketahanan Nasional pada elemen Panca Gatra sebagai berikut (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018a):

a. Gatra Ideologi

Ketahanan nasional di bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

b. Gatra Politik

Ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

c. Gatra Ekonomi

Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

d. Gatra Sosial Budaya

Ketahanan nasional di bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

e. Gatra Pertahanan Keamanan

Ketahanan nasional di bidang Hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

### 3. Aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara

Amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Seiring dengan hal tersebut, Pasal 9 Ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan antara lain melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Hal ini menunjukkan kesadaran bangsa Indonesia, bahwa AGHT tidak hanya muncul dalam bidang pertahanan keamanan dan wilayah saja, namun akan muncul dari segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga IPTEK.

Berbagai AGHT dari berbagai bidang kehidupan nasional tersebut tidak bisa dihadapi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian prajurit TNI semata. Akan tetapi diperlukan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk mengabdikan sesuai dengan profesinya masing-masing secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, ter-standarisasi dan massif (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018b).

Kesiapan tiap warga negara secara psikis maupun secara fisik merupakan kemampuan awal bela negara warga tersebut. Tidak hanya aksi fisik di lingkungan masing-masing sesuai dengan profesi dan kemampuannya, namun juga jati diri, sikap, perilaku, dan pengetahuannya, atas dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, serta kerelaan untuk berkorban bagi bangsa dan negara. Melalui sikap dan perbuatan Bela Negara, tiap warga negara dapat berbuat untuk meningkatkan daya tahan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, memperkuat dan memperkokoh Ketahanan Nasional (Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara, 2018a).

#### 4. Integritas dan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik

Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara mengarah pada pembangunan integritas dan kinerja organisasi yang

berkesinambungan. Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan serta pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara adalah modal pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan publik, integritas organisasi pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara keberadaan etika, kompetensi, akuntabilitas, dan tentunya transparansi yang menjadi pembangun integritas, juga akan meningkatkan kepuasan publik. Resultan kepercayaan dan kepuasan publik selanjutnya menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi. Namun demikian, jika kinerja tersebut tidak lahir dari pemahaman serta aktualisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, maka kinerja organisasi justru dapat menjadi kontraproduktif karena terdeviasi dari amanah negara dan rakyat yang harus diemban oleh ASN.

#### 5. Latihan

Untuk memahami aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara, peserta secara berkelompok diminta melakukan hal-hal berikut:

- a. Review dan konsolidasi hasil survei mini dan penugasan sebelumnya.
- b. Mendiskusikan Konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai dasar bela negara.
- c. Mendiskusikan dan membuat *Metaplan* nilai-nilai dasar bela negara.
- d. Memaparkan hasil diskusi kelompok

#### 6. Rangkuman

- a. Integritas merupakan konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan.
- b. Integritas mengharuskan seseorang pegawai untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

- c. Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan perusahaan
  - d. Integritas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di sektor pemerintahan.
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan diskusi dan tugas kelompok? Apakah Saudara berhasil membuat *metaplan* aksi perubahan sebagai aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari Agenda berikutnya. Jika belum, saudara dapat meninjau kembali materi pokok di atas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sasaran Pembinaan Bela Negara adalah terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui proses pembangunan nasional, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Terbangunnya rasa cinta tanah air membuat bangsa Indonesia mengetahui apa saja dalam sektor-sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicintainya, sekaligus rasa peduli untuk mewaspadaai jika ada AGHT yang mengganggu hal yang dicintainya tersebut. Akan tetapi, kewaspadaannya tetap berlandaskan tujuan-tujuan negara serta hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kepedulian yang positif membuat seorang warga rela berkorban demi

kecintaan-nya terhadap tanah air. Melalui dukungan dengan kemampuan awal bela negara nya yang didapatkan dari Asta Gatra dan Ketahanan Nasional, makan akan terwujud tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya manusia Paripurna, berdasarkan Pancasila.

Secara sistemis pola yang disampaikan di atas mencerminkan pola manajemen perubahan sebagai salah satu substansi yang selama bertahun-tahun menjadi materi pokok diklat kepemimpinan ASN. Manajemen perubahan sebagai perjalanan dari kondisi saat ini secara bertahap dan sistematis menuju kondisi yang diinginkan di masa depan juga dapat diterjemahkan sebagai perjalanan dari permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan di tanah air menuju kondisi ideal yang digariskan oleh ketahanan nasional di segenap Gatra untuk menghantarkan kepada terwujudnya visi pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Demikianlah Pancasila senantiasa mengingatkan kita bahwa pembangunan nasional harus menjadi sarana pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani secara seimbang.

## **B. Tindak Lanjut**

Kami sadari masih banyak kekurangan, baik dari segi literatur maupun substansi. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk penyempurnaan modul ini kami terima dengan senang hati dan terbuka. Kami mendorong pengguna modul dan fasilitator untuk dapat mencari sumber lain lebih lanjut dalam bahan bacaan yang ada dalam daftar pustaka serta literatur lainnya yang terkait dengan substansi mata pelatihan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. R. (2013, Juli). Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri Dan Beban Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1223-1233.
- Asmaroini, A. P. (2017, Januari). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50-64.
- Baidowi, A. (2017). Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri, Penghargaan, dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja (Studi pada karyawan PT. Gading Mas Indonesia Teguh jember). *Jurnal Ekonomi / manajemen/ SDM*.
- Darmawan, C. (2015, Januari 8). *Basarnas dan Bela Negara*. Retrieved from Universitas Pendidikan Indonesia: Berita: <http://berita.upi.edu/basarnas-dan-bela-negara/>
- Dwiarti, E. S. (2018, Februari). Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 6, 58-77.
- Eddy, I. W. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal DHARMASMRTI* , 1(18), 116-123.

- Hanafi. (2018). Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56-63.
- Ikhsan, M. A. (2017). Nilai - Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al-Qur'an. *JIPPK, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 108-114.
- KCPI, K. C. (Director). (2019). *Pernyataan Presiden Soekarno tentang Irian Barat (Papua) tahun 1963* [Motion Picture]. Youtube Channel. Retrieved November 20, 2019, from <https://youtu.be/apsdJliayFU>
- Kellerman, B. (2007, Desember). *What Every Leader Needs to Know About Leadership*. Retrieved from Harvard Business Review: <http://hbr.org/2007/12/what-every-leader-needs-to-know-about-follower/ar/1>
- Kurnia, T. (2015). Hubungan antara Kohesivitas Organisasi dengan Aktualisasi Diri pada Anggota Komunitas Pemuda Gereja. *SEMINAR PSIKOLOGI & KEMANUSIAAN*, (pp. 396-400). Malang.
- Latif, Y. (2018, Maret). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 33, 5-19.
- Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
- Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, Publisher, Inc.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2012). *Kajian Reformasi Regulasi Indonesia, Memperkuat Koordinasi dan Menghubungkan Pasar*. Organization for Economic Co-operation and Development.
- Peserta Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan. (2018). *Hanacaraka: Simulasi Peperangan Pembentukan Opini Publik Menggunakan Metode Kartu Edukasi*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Pusdiklat Manajemen Pertahanan.
- Point of You. (2019, November 24). *The Coaching Game*. Retrieved from Point of You Indonesia: <https://www.pointsofyou.id/shop/the-coaching-game/>
- Pratika, E. (2014). Aktualisasi Diri dan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Pelatihan Pada Karyawan PT. Pelindo. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5(1), 7-14.
- Rahmadi, H. B. (2016). Transformasi Daya Gempur Menjadi Daya Saing sebagai Perwujudan Semangat Kepahlawanan. In *Majalah Catra* (p. 5). Jakarta: Setjen Wantannas.

- Rahmadi, H. B. (2019, Juli 5). *The Millennial Approach to Balance Individual, Organizational, & National Interests in the Globalizing World*. (H. B. Rahmadi, Performer) Mini Human Capital Summit Kementerian Keuangan RI, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Ruslan, I. (2013, Desember). Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 2013.
- Samekto, A. (2019, Agustus 15). *GBHIP sebagai Pedoman Pembangunan Berdasarkan Pancasila*. Retrieved November 20, 2019, from Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia: <http://www.bpip.go.id/informasi/gbhip-sebagai-pedoman-pembangunan-berdasarkan-pancasila/>
- Sari, E., & Dwiarti, R. (2018). Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 06(01), 59.
- Soegiono. (2012). *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekarno, I. (2006). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno. (2010). Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat. *MMH, Jilid 39 No. 1 Maret*, 17-26.
- Sulaiman, Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Law Reform Volume 15, Nomor 1*, 12-24.
- Tim Penyusun Kajian. (2010). *Laporan Akhir Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, BAPPENAS.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018a). *Modul I Konsepsi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018b). *Modul II Implementasi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Umar, N. (2012, Maret 19). *Apa itu Insan Kamil? (1)*. Retrieved November 20, 2019, from [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/tasawuf/12/03/18/m139ju-apa-itu-insan-kamil-1](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/tasawuf/12/03/18/m139ju-apa-itu-insan-kamil-1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wahyudi, I. (2016). *Datasawala: Simulasi Peperangan Ekonomi Menggunakan Metode Board Game*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Wantannas. (2018). *Modul I Konsepsi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.